

Anggota DPR RI Habiburokhman: RUU Otsus Papua Harus Akomodir Hak Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial

Tony Rosyid - INDONESIASATU.CO.ID

Jun 8, 2021 - 09:13



Anggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Habiburokhman

JAKARTA - Anggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Habiburokhman mengatakan, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya bagi Orang Asli Papua (OAT) saja, melainkan kepada seluruh masyarakat

harus dilindungi hak-haknya. Ia tidak menginginkan adanya pelanggaran HAM di manapun termasuk di Papua.

“Jadi orientasinya bukan orang per orang, semua harus dilindungi baik asli Papua, maupun pendatang. Dengan undang-undang yang baru ini, kita harus bisa melindungi,” terang Habiburokhman saat rapat kerja Panja Otsus Papua DPR RI dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mengapresiasi paparan dari Ketua Komnas HAM yang menyampaikan bahwa penegakan HAM tidak hanya sebatas penanganan yang berbentuk pelanggaran seperti kekerasan, hak untuk hidup hak untuk tidak disiksa atau semacamnya. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan secara ekonomi dan sosial juga perlu ditegakkan.

“Hak untuk mendapatkan kesejahteraan, kalau kita mengacu pada konstitusi kita, itu perlu kita ke depankan dan sangat relevan dengan isu-isu kita. Karena mau 2 persen atau 2,5 persen, dana Otsus ini kalau tidak sampai ke orang yang berhak, yakni rakyat Papua, ya sama saja,” tegasnya.

Ia berpandangan, ke depan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diundang dalam rapat Otsus selanjutnya. Menurutnya, dana yang besar tapi tidak sampai ke rakyat bukan sekedar pelanggaran atas hak rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan, namun tindak pidana korupsi merupakan hal yang harus didorong pencegahan dan pemberantasannya. (hal/es)